

DAMPAK EKONOMI PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU

Herispon

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

E-mail: herisponpiliang@gmail.com

Abstract: *This study was an analysis of the condition of the covid pandemic 19 events that occurred from the end of November 2019 to the beginning of June 2020. Pandemic events that occur in many countries in the world generally, in Indonesia and the city of Pekanbaru, Riau in particular that is the enactment Large-scale Social Restrictions (RSSL) has given an influence on the life and economic order of the community. By uses the method of literature study and analysis of real events that occur in society, it was found that the current RSSL and pandemic had weakened the joints of the economy; individuals, households large companies or small companies without exception due to individual space restrictions, groups in carries out economic activities and ended in termination of employment (FLE), temporary leave of work, finally reduced the income and consumption of the people*

Keywords: *Covid 19 and Large-scale Social Restrictions*

A. PENDAHULUAN

Kasus Covid 19 yang pertama terjadi di Wuhan China akhir November 2019 dengan cepat meluas ke banyak negara di dunia. Kemudian wabah covid 19 menjalar ke Hongkong, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura dan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, wabah covid-19 sudah menjadi monster yang menakutkan bagi banyak orang di Indonesia khususnya, 3 tiga bulan sesudah peristiwa pertama kali terjadi di China tepatnya pada bulan Maret 2020 masalah wabah disikapi serius oleh pemerintah setelah adanya himbuan dari WHO untuk cepat tanggap terhadap wabah yang melanda dunia, mengapa ? karena proses penularannya yang sangat sulit dideteksi dan dihindari, yaitu melalui sentuhan atau apa yang dipegang oleh orang yang diduga positif covid 19, bila dipegang oleh orang yang sebelumnya sehat maka kemungkinan besar dia akan tertular. Bagaimana bila kondisi ini berlangsung lama dan dialami oleh banyak negara di dunia ini ?. Bila banyak negara yang terjangkit covid-19 ini maka diduga negara tersebut menghabiskan banyak lagi energi untuk merecovery rakyatnya untuk bangkit dari wabah tersebut, jika ini terjadi tentu sektor investasi, produksi dalam negeri, atau ekspor impor dan perdagangan antar negara akan terganggu, maka negara akan mengalami defisit anggaran sedangkan disisi lain pemerintah tak akan sanggup memberikan subsidi kepada rakyatnya per-rumah tangga atau

perkepada dalam waktu lama. Sejak periode akhir November 2019 sampai dengan April 2020 berkaitan dengan pandemic covid 19 diseluruh dunia seperti yang dilaporkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bahwa 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. Berdasarkan studi terbaru ILO, sebanyak 1,25 miliar pekerja yang berada di sektor paling terdampak tersebut berisiko terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan upah serta jam kerja (goriau.com, April 2020).

Secara nasional dampak ekonomi dari pandemi covid 19 telah menurunkan omzet penjualan pelaku usaha; usaha besar, UMKM dan pedagang kaki lima hingga 80 persen (goriau.com, April 2020). Akibatnya, perusahaan dan pelaku usaha tak mampu lagi menanggung semua biaya operasional. Ancaman (PHK) tak hanya membayangi para pekerja di Indonesia. Sejatinya, kondisi serupa terjadi di negara lain. Hal ini dipicu melesunya kegiatan ekonomi akibat pandemi Virus Corona (Covid-19) yang terjadi sejak awal 2020. Badai resesi terbayang di depan mata, meski pandemi Covid-19 tak diketahui kapan akan berlalu.

Kondisi di daerah pelan tapi pasti pandemi covid 19 telah memberikan efek yang melemahkan sendi-sendi ekonomi masyarakat dari usaha skala besar sampai ke usaha skala kecil terutama terhadap

pengurangan jam operasional perusahaan, pengurangan jumlah tenaga kerja atau memberhentikan sementara sejumlah karyawan dan pegawainya. Sejumlah daerah di Indonesia telah mengumumkan jumlah pekerja yang terkena PHK (goriau.com dan cnnindonesia.com, April 2020), yaitu; 1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melaporkan 162.416 pekerja dirumahkan dan kena PHK. Pekerja tersebut berasal dari 18.045 perusahaan. Rinciannya, 30.137 dari 3.348 perusahaan terkena PHK dan 132.279 dari 14.697 perusahaan terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. 2) Disnakertrans Kabupaten Bogor, menyatakan, ada 70 perusahaan di Kabupaten Bogor yang merumahkan dan melakukan PHK. Kabupaten Bogor mencatat ada 82 karyawan di PHK. Selain itu, 1.467 pekerja dirumahkan tanpa dapat gaji. 3) Disnakertrans Jawa Barat, melaporkan 1.476 perusahaan yang terdampak pandemi Corona. Dari jumlah itu, ada sekira 53.465 pekerja yang dirumahkan hingga terkena PHK. Disnakertrans Provinsi Jabar, menjelaskan 53.465 pekerja yang terdampak tersebut memiliki nasib yang berbeda-beda. Sebanyak 34.365 orang di antaranya diliburkan, 14.053 pekerja dirumahkan, dan 5.047 pekerja kena PHK. 4) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, lebih dari 400 perusahaan yang berdomisili di Kota Palembang sebanyak 1.262 pekerja di Palembang yang di-PHK maupun dirumahkan, akibat dampak dari terbatasnya aktivitas perekonomian sejak merebaknya kasus COVID-19. 5) Di sektor perhotelan misalnya. Hingga 1 April 2020, tercatat hampir 1.200 hotel di seluruh Indonesia tutup, melaksanakan cuti dibayar dan tidak dibayar hingga PHK. Stimulus pemerintah hanya mengurangi beban dari sisi pajak dan cicilan pinjaman. Sementara cashflow perusahaan tetap anjok. 6) PT Fast Food Indonesia (FAST) telah menutup sekitar 97 gerai lantaran adanya penutupan pusat-pusat perbelanjaan karena penerapan PSBB diberbagai daerah di Indonesia. 7) Data pertengahan April 2020 dikutip dari laporan Perhimpunan Hotel dan Restoran Eko dan Bisnis (*Riau Economics and Business Review*) Volume 11, Nomor 2, 27 Juni 2020

(PHRI) Riau; PHRI pusat menyatakan ada 1.139 hotel yang telah tutup di Indonesia. Sebanyak enam hotel di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sudah tutup sementara karena tingkat hunian atau okupansi terus menurun akibat pandemi COVID-19. “Okupansi hotel sangat rendah, di bawah 10 persen (sedangkan) biaya operasional sangat tinggi,” enam hotel yang tutup sementara waktu adalah Hotel Royal Asnof, Prime Park, Amaris, Madina, Oase, dan Winstar Hotel. PHRI Riau juga mencatat penutupan pusat konvensi dan restoran, yakni Pekanbaru Convention & Exhibition (SKA Co-Ex) dan Sultan Resto. Dari semua hotel, restoran dan pusat konvensi yang ditutup tersebut, ada sekitar 300 karyawan yang terpaksa dirumahkan. 8) Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut ada 1,2 juta orang secara nasional yang terkena PHK sejak merebaknya kasus COVID-19.

Ini adalah kenyataan yang ditanggung oleh pelaku usaha (besar dan kecil) di Indonesia saat ini dan di kota Pekanbaru khususnya, bila berlangsung lama akan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat ditingkat daerah ataupun nasional

METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan kepustakaan ([Herispon, 2017](#)), artinya studi ini dibuat berdasarkan pada kajian kepustakaan dari beberapa sumber data yang dipercaya keabsahannya, dan dilakukan dalam rentang waktu Januari 2020 s/d Mei 2020 selanjutnya dihubungkan dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dalam masa pandemic covid 19 dan PSBB di Kota Pekanbaru.

HASIL

Imbas terhadap harga; dampak ekonomi pandemi COVID-19 mulai terasa di Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan terjadinya deflasi pada bulan Maret 2020 sebesar -0,01 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau di

Pekanbaru, Riau mengalami deflasi sebesar -0,01 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,45. Inflasi Tahun Kalender (Maret 2020 - Desember 2019) sebesar 0,76 persen dan Inflasi Year on Year (Maret 2020 terhadap Maret 2019) sebesar 2,01 persen. BPS menghitung deflasi berdasarkan IHK di tiga kota, dua kota mengalami deflasi dan satu kota mengalami inflasi. Kota yang mengalami inflasi yaitu Kota Pekanbaru sebesar -0,01 persen. Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Kota Dumai sebesar -0,05 persen dan Kota Tembilahan sebesar -0,04 persen (kepri.antaranews.com).

Adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya tiga indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,30 persen, diikuti kelompok transportasi sebesar -0,27 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,02 persen. Sedangkan tujuh kelompok lain mengalami inflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,09 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,56 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,45 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,31 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing sebesar 0,04 persen. Kemudian inflasi juga terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen. Satu kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Dari 24 kota di Sumatera yang menghitung IHK, empat belas kota mengalami deflasi, dengan deflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar -0,79 persen, diikuti oleh Kota Jambi sebesar -0,65 persen dan Kota Bungo sebesar -0,56 persen. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Bengkulu dan Kota Padang sebesar -0,02 persen (kepri.antaranews.com). Sejak wabah corona mulai merebak di provinsi Riau sejak bulan Maret 2020, warga dan pemerintah mulai mengurangi kegiatan yang

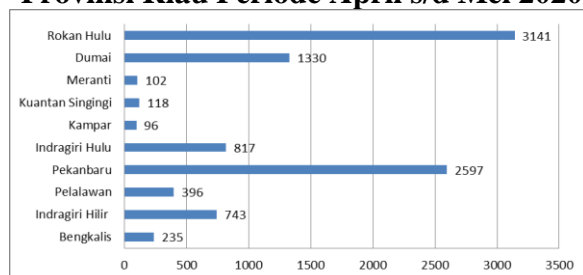
mengumpulkan orang dan lebih sering di dalam rumah. Hal tersebut membuat belanja warga menurun, bandara dan pusat perbelanjaan sepi, restoran dan kafe banyak tutup, sedangkan stok barang lebih banyak karena tingkat konsumsi masyarakat menurun.

Imbas terhadap tenaga kerja; pandemi covid 19 yang tidak berwujud telah memberikan rasa kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat karena pandemi ini tidak bisa dilihat, tapi menimbulkan efek yang sangat kuat kepada masyarakat untuk tidak melakukan kontak fisik antara satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan untuk mengurangi kecemasan dan memutuskan mata rantai penyebaran pandemi covid 19, maka pemerintah kota Pekanbaru sejak Jumat, 17 April 2020 memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan dihadapi oleh masyarakat, tapi menimbulkan efek lain yaitu terjadi pembatasan ruang gerak masyarakat, pembatasan operasional perusahaan, pembatasan aktivitas pekerja dan karyawan pada masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja.

Seperti yang dilaporkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau, bahwa pada periode 11 April 2020 telah dirumahkan sebanyak 3647 orang dari 89 badan usaha di Riau, sedangkan yang di PHK melapor sebanyak 28 orang (halloriau.com, April 2020). Selanjutnya pada periode 7 Mei 2020 telah dirumahkan sebanyak 4233 orang dari 105 perusahaan, sedangkan yang di PHK melapor sebanyak 146 orang (gatra.com, Mei 2020). Dan diperkirakan jumlah karyawan atau pegawai yang sudah dirumahkan sampai pada periode awal Mei 2020 mencapai 92.893 orang (sektor formal dan informal) dari jumlah ini sebanyak 25.796 orang yang telah didaftarkan untuk mendapatkan kartu prakerja sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial Rp 600.000 selama 4 bulan ke depan, dimulai April 2020 dan disetor ke rekening masing-

masing pekerja. Sebaran penerima kartu prakerja sebagian dari 25.796 orang pada masing-masing kota dan kabupaten di Riau dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Pekerja yang dirumahkan di Provinsi Riau Periode April s/d Mei 2020



Dengan adanya himbuan dari pemerintah kota Pekanbaru untuk *stay at home, work for home, social distancing*, dan pembatasan ruang gerak masyarakat dalam aktivitas (khususnya ekonomi) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan PSBB dengan tujuan untuk menangkal penyebaran covid-19 diduga akan efektif, bagi kalangan atas, yang punya saving berlebih bisa tahan 6 bulan atau lebih, permasalahannya adalah rakyat, pekerja, pegawai, karyawan, buruh yang tidak punya kartu prakerja dan tidak punya saving dari kalangan menengah kebawah, yang diharapkan hanya pendapatan yang diterima harian, mingguan atau perbulan, disuruh untuk tetap dirumah, hanya ada dua pilihan bagi mereka, yaitu; 1) Tetap keluar rumah untuk mencari nafkah dengan resiko menghadapi wabah covid-19, maka media pelunalaran wabah diduga akan dapat meluas. 2) Tetap bertahan dirumah, pendapatan yang semakin menipis, mendekati nol, bahkan negatif (dapat terjadi utang untuk menyelamatkan perut) bila tidak ada solusi untuk kondisi ini, maka resiko akan dihadapi adalah kelaparan (Herispon, 2017). Jika rakyat sudah kelaparan maka dampaknya akan lebih buruk lagi.

PEMBAHASAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia (kompas.com, April 2020). Upaya mencegah meluasnya wabah Covid-19,

pemerintah mengizinkan daerah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan PSBB tertuang dalam PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian dibuat pedoman pelaksanaannya dengan Permenkes No 9 tahun 2020 (tirto.id, April 2020). PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Pembatasan tersebut meliputi; 1) peliburan sekolah dan tempat kerja, 2) pembatasan kegiatan keagamaan, 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, 4) pembatasan kegiatan sosial budaya, 5) pembatasan moda transportasi, 6) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran (tirto.id, April 2020). Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait: 1. pertahanan dan keamanan 2. ketertiban umum 3. kebutuhan pangan 4. bahan bakar minyak dan gas 5. pelayanan kesehatan 6. perekonomian 7. keuangan 8. komunikasi 9. industri 10. ekspor dan impor 11. distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat (tirto.id, April 2020). PSBB berbeda dengan karantina wilayah (lockdown), di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah. Dalam tindakan karantina, penduduk atau masyarakat di rumah,

wilayah tertentu kawasan RT, RW, atau kawasan kelurahan, atau satu kabupaten, kota. Ini yang membedakannya karantina wilayah dengan PSBB yang dapat memutuskan rantai penularan dari hulunya (kepri.antaranews.com).

Daerah yang telah memenuhi syarat tertentu, boleh mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat. Saat akhir bulan April 2020 sudah ada 18 daerah di Indonesia sudah mendapatkan izin PSBB, yaitu 2 provinsi dan 16 kabupaten atau kota, termasuk Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Untuk level provinsi salah satunya provinsi tetangga Riau yaitu Sumatera Barat. **Dalam** rangka mencegah meluasnya kasus positif baru Covid-19, beberapa Pemda melakukan PSBB, seperti kota Pekanbaru di Riau. Beberapa daerah melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat dari model sebelumnya, seperti Kota Semarang di Jawa Tengah. Kebijakan kesehatan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus penyakit COVID-19 ini berdampak pada makin tertekannya kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi mau tidak mau harus dipikul dan diatasi, karena jika tidak, maka tujuan pencegahan penularan Covid-19 yang diharapkan dari pembatasan sosial tidak akan optimal ([Firmansyah, April 2020](#)).

Kebijakan ekonomi pada masa wabah ini seharusnya mengikuti dan mendukung kebijakan di bidang kesehatan yaitu mencegah wabah Covid-19 meluas bahkan habis. Meskipun demikian, ekonomi bukanlah persoalan yang sederhana yang sekedar dikesampingkan saja selain kebijakan kesehatan. Persoalan yang dipikirkan adalah bagaimana ketahanan pangan masyarakat jika kebijakan PSBB diambil oleh pemerintah kota Pekanbaru atau Provinsi Riau. Fokusnya adalah bagaimana strategi ekonomi jangka pendek yang paling mungkin dapat dan cepat dilakukan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini, bagaimanapun, perekonomian tidak akan bergerak jika wabah Covid-19 ini masih merajalela.

Dampak PSBB secara Nasional

Jika dilihat dampak ekonominya, wabah Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia pada sektor produksi, distribusi, konsumsi, dan sektor layanan jasa melemah, melemahnya kondisi ekonomi ini dapat diukur melalui banyak indikator, seperti permintaan masyarakat; turunnya permintaan konsumsi produk oleh masyarakat dan ekspor, produksi dengan turunnya produktivitas tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan jam kerja pada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, UMKM, dan sektor informal, sulitnya impor bahan untuk produksi, serta melumpuhkan jalur transportasi dan distribusi barang dan orang ([Firmansyah, April 2020](#)).

Banyak sektor ekonomi termasuk di dalamnya yang tergolong UMKM, apalagi jenis usaha yang masuk kategori informal, yang jumlahnya sangat banyak, terhempas saat ini. Yang dibarengi persoalan sosial ekonomi yang muncul akibat wabah Covid-19 setelah pelaksanaan PSBB, adalah persoalan menurunnya pendapatan masyarakat, yang menyebabkan turunnya daya beli. Artinya masyarakat menjadi tidak mampu membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Jangankan membayar cicilan kredit atau utang, membeli beras saja sudah berat. Jika PSBB dilakukan dengan ketat agar dapat berhasil mencegah wabah meluas, maka mobilitas masyarakat makin terbatas dan semakin menyulitkan kondisi ekonominya. Persoalan ekonomi jangka pendek yang harus disiapkan strategi mitigasinya oleh pemerintah daerah, adalah kemampuan masyarakat mengakses bahan pangan khususnya bahan pangan pokok menjadi sangat lemah bahkan habis ([Firmansyah, April 2020](#)).

Dampak PSBB di tingkat Lokal/Daerah

Bagi masyarakat kalangan menengah kebawah, dengan pendapatan perbulan tetap bahkan cenderung menurun, disisi lain konsumsi yang membengkak untuk kebutuhan dapur, listrik, pulsa dan jajan anak harus dilakukan penghematan seiring

menurunnya pendapatan bulanan (ini adalah kontradiksi). Biaya transportasi sedikit menurun karena aktivitas banyak dirumah, konsumsi BBM berkurang dan secara nasional juga dapat berkurang, diasumsikan mengurangi beban anggaran pemerintah disatu sisi, tapi disisi lain juga diiringi oleh menurunnya pendapatan keluarga. Pelaku-pelaku ekonomi (terutama menengah dan kecil atau UMKM) pendapatan mulai berkurang bahkan berhenti, imbasnya pembayaran upah/gaji dapat berkurang, ditunda, tidak dibayar. Efeknya konsumsi masyarakat turun, belanja barang konsumsi turun, imbasnya kembali pada pelaku ekonomi / perusahaan, efek lainnya adalah pengurangan karyawan (PHK) maka kontribusi terhadap persentase pengangguran meningkat. Bila pengangguran meningkat, maka beban keluarga meningkat, beban negara bertambah dan munculnya masalah sosial lainnya.

Di samping itu, persoalan yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan pangan, terutama bagi daerah yang menerapkan PSBB mempunyai ketergantungan pada daerah lain, seperti beberapa daerah di Riau, selain Kota Pekanbaru yang sudah menerapkan PSBB, dan yang juga akan menyusul seperti Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Kampar, Siak dan Pelalawan. Tiga kabupaten terakhir tampaknya cukup menjanjikan dalam ketahanan pangan, meskipun belum 100 persen aman. Tindakan penyelamatan ekonomi penting untuk dilakukan segera agar tidak menimbulkan persoalan berat lainnya. Tekanan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan keresahan bahkan kerusakan sosial. Persoalan ekonomi yang sudah terjadi dalam masa pembatasan sosial adalah banyak pekerja yang mengalami PHK dan banyak usaha masyarakat terhenti atau tutup sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi. Artinya mereka yang terdampak ini tidak lagi memiliki daya beli, dan jumlah golongan ini banyak dan lebih besar lagi dengan ditambah keluarga pra sejahtera yang sebelum Covid-19 sudah ada ([Firmansyah, April 2020](#)).

Kondisi riil yang terjadi di Provinsi Riau seperti yang dilaporkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan di Pekanbaru memastikan penyebaran wabah penyakit akibat virus corona (COVID-19) akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bumi Lancang Kuning ([sumatera bisnis.com, April 2020](#)). Adapun pada kuartal I/2020, asumsi perekonomian Riau tumbuh positif pada kisaran 2,70% s/d 3,10% secara YEAR-ON-YEAR DAN Pandemi covid 19 dipastikan akan menyebabkan koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi Riau pada kuartal II/2020 ([sumatra.bisnis.com, April 2020](#)). Selanjutnya kondisi riil yang terjadi setelah berlakunya PSBB di kota Pekanbaru di provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) Lalu lintas orang melalui penerbangan luar negeri/LN dan dalam negeri/DN menurun drastis, imbasnya pihak-pihak yang terkait disektor ini, seperti; akvitas bandara berkurang, pramugari, pegawai/karyawan, pedagang atau pengais rezeki bandara pendapatannya berkurang bahkan nol. 2) Lalu lintas orang melalui transportasi darat; bus, travel antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) atau transportasi dalam kota Pekanbaru (konvensional / online) menurun, bahkan pergerakan masyarakat sudah mulai diawasi dan dibatasi (misal himbauan untuk sementara tidak pulang kampung) maka imbasnya dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak langsung. 3) Sektor layanan jasa perhotelan, tingkat hunian hotel berkurang bahkan nol, imbasnya kepada pihak-pihak yang terkait; seluruh jajaran pimpinan dan karyawan hotel, laundry, catering, taksi, dan lainnya. 4) Sektor pariwisata sebagian atau seluruhnya ditutup maka incomenya berkurang, imbasnya ditanggung oleh seluruh pihak yang terkait. 5) Sektor produksi / manufacture; sebagian atau seluruhnya ditutup atau dibatasi seperti pabrik pengolahan sawit, bubur kertas, plywood atau pabrik lainnya, maka income akan berkurang atau operasionalnya dapat

terganggu. 6) Sektor ritail, seperti; supermarket, transmart, hypermart, mall tingkat kunjungan masyarakat turun drastis, selanjutnya alfamart, indomart bila sebagian atau seluruhnya ditutup, maka imbasnya akan sangat dirasakan oleh karyawan dan masyarakat. 7) Omzet pengusaha, pedagang dipasar tradisional, pasar rakyat, pasar kaget dan pedagang kakilima turun sampai 80%. (angka proyeksi berdasarkan keluhan sesama pedagang). 8) Nongkrong di café, rumah makan, kedai kopi, kedai lontong sudah jauh berkurang, maka omzet dari usaha ini juga berkurang. 9) Layanan publik dilembaga/dinas pemerintah dikurangi dan dibatasi. 10) Perberlakuan jam malam dan PSBB bagi masyarakat kota, sudah diberlakukan oleh sebagian besar ditingkat RT, RW atau Kelurahan yang masuk dalam zona merah.

Sendi-sendi kehidupan ekonomi, seperti; investasi tertahan, produksi tidak jalan, konsumsi stagnan dan distribusi barang tidak lancar. Imbasnya mesin ekonomi tidak hidup, maka roda perekonomian tidak berputar, efeknya pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru, Provinsi Riau ataupun skala nasional akan terjadi inersia (kelambanan) dan pembangunan sarana prasarana macet bahkan terhenti. Disini tidak bicara pertumbuhan ekonomi lagi, untuk kondisi yang dihadapi sekarang ini teori yang relevan adalah teori konsumsi “absolut income hypothesis = AIH” dari Keynes yaitu; $C = Co + bY$ (Miller and Meiners, 1993; Raharja dan Manurung, 2005). Dapat diartikan bila income (Y) seseorang nol, dia tidak akan berhenti makan dan minum (konsumsi), bila income seseorang nol maka diduga dampak yang muncul adalah: Income negatif, yaitu pinjaman (utang) antar individu atau antar rumah tangga akan meningkat (Firmansyah, 2007 dan Andries, 2015). Pelunasan pinjaman bank/leasing/ toko menjadi macet. Tingkat kriminal diduga dapat meningkat untuk memper tahankan perut tetap dapat makanan.

Upaya Penanggulangan, Strategi dan Solusi;

Pemerintah secara resmi menetapkan wabah virus corona (Covid-19) sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam keadaan bencana, pemerintah diamanatkan oleh konstitusi harus mampu menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakatnya ditengah bencana. Pemerintah harus mampu melihat keberdayaan dan ketidakberdayaan masyarakat atas kelangsungan hidup selama dan akibat dari bencana secara Nasional hingga tahap pemulihan setelah status Bencana Nasional tersebut dicabut. Disisi lain pemerintah juga harus mampu mengatakan keterbatasan dengan jujur kepada rakyat, agar rakyat juga menyadari betapa pentingnya arti kata-kata persatuan, kata-kata gotong royong, kata-kata yang kuat membantu yang lemah, hingga kata-kata berat sama dipikul ringan sama dijinjing, yang dibutuhkan saat ini adalah jawaban teknis bukan jawaban politis dengan menyebutkan program pembagian sembako, program prakerja, program PKH, dan lain-lain dianggap dan merupakan program rutin tahunan dan merupakan janji politik yang memang harus ditunaikan, meskipun tanpa ada bencana.

Upaya prinsip yang harus dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) adalah menyelamatkan bangsa ini dari kepunahan akibat wabah covid-19, selama dunia ini ada estafet generasi harus tetap berjalan dalam NKRI, oleh karena itu, diperlukan; 1) Kewaspadaan dan kepedulian seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia dari wabah yang sedang berjangkit dengan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 2) Kewaspadaan terhadap penghianat-penghianat bangsa yang tidak memberikan dan menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat sebagaimana mestinya, khususnya dalam masa pandemic covid, 3) Menjamin ketersediaan pangan dan

memberikan gambaran nyata, dimana masyarakat harus siap menghadapi kondisi terburuk bila itu terjadi, dengan bekal sejarah masyarakat Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit yaitu hanya memakan ubi, talas dan jagung dizaman penjajahan dan revolusi dan itu harus diketahui oleh generasi muda sekarang ini, 4) Meningkatkan rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa kegotongroyongan untuk sesama dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, khususnya dalam menghadapi wabah covid-19 ini, 5) Memberikan kelonggaran, keringanan kepada masyarakat pelaku usaha (UMKM) yang mempunyai pinjaman di lembaga keuangan, 6) Menjaga intrik atau infiltrasi dari pihak luar yang memanfaatkan kondisi yang terjadi di Indonesia.

Beberapa kebijakan dari pemerintah pusat, seperti; kemudahan pajak, bantuan langsung tunai pada Program Keluarga Harapan, kartu pra kerja, kebijakan relaksasi pembayaran kredit dan KUR untuk UMKM, keringanan biaya listrik, dan kebijakan-kebijakan makroekonomi, fiskal dan moneter lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya dapat disinkronkan dan dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan jangka pendek. Terutama terkait penerapan PSSB, kebijakan ini perlu dikerjakan dengan fokus dan konsentrasi tinggi. Strategi pengamanan ekonomi rakyat dalam menghadapi masa PSSB di daerah ini adalah kombinasi dari perbaikan kemampuan beli masyarakat dan jaminan ketersediaan barang. Selama masa PSSB, selama pandemic covid 19 belum berakhir atau menghadapi kondisi terburuk pemerintah daerah/pusat harus menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan rakyatnya dengan memberikan jaminan, yaitu; 1) Pemerintah harus menjamin bahwa barang tersedia di daerah dengan PSBB dan masyarakat mampu mengaksesnya, 2) Pemerintah mengetahui data secara akurat seberapa banyak keluarga yang tidak mampu mengakses barang kebutuhan pokok, yang selama ini data selalu bermasalah, 3) Pemerintah menyiapkan kebijakan dan anggaran yang cukup untuk

keadaan terburuk, yang kadang dibelanjakan tidak efektif untuk membantu masyarakat agar berkemampuan mengakses bahan kebutuhan pokok, 4) Menggalakkan dan menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan dimasing-masing wilayah yang selama ini mulai terabaikan dengan swadaya masyarakat dan dapat dibina oleh BULOG dan pemerintah daerah.

Disaat yang sama, pemerintah yang daerahnya berlaku PSBB harus mengambil peran lebih besar melalui (walikota, bupati, atau gubernur) dalam konteks keterkaitan ekonomi dan menjamin ketersediaan pangan, yaitu; 1) Mengatur koordinasi hubungan daerah penghasil pangan dalam provinsi, misalnya; kabupaten Kampar atau Rohil, untuk mendukung ketersediaan pangan di Pekanbaru, Kota Dumai, kota Duri dan kota Bengkalis atau didaerah PSBB dan zona merah pandemic covid, 2) Memperkuat jaminan distribusi luar daerah dengan kerjasama, koordinasi atau menghubungi kepala daerah luar seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kemungkinan munculnya ego daerah penghasil pangan, yaitu dengan alasan penyelamatan rakyat daerah sendiri didahulukan, baru rakyat daerah lain, maka stok pangan tidak dikirim ke luar daerahnya, maka segala strategi pengamanan pangan perlu dilakukan sejak awal, 3) Melakukan negosiasi dengan luar negeri bila diperlukan, dengan kemungkinan meminta bantuan atau melakukan impor beras atau gula dari Vietnam, Malaysia, atau Thailand, 4) Melakukan karantina wilayah pada daerah atau desa khusus penghasil pangan pokok, agar jangan sampai tertular dan menjadi daerah pandemik Covid-19, sehingga tidak dapat berproduksi. Misalnya daerah Harapan Baru di wilayah Duri yang merupakan penghasil pangan di Bengkalis, atau sawah penghasil beras di Rohil, Siak, Pelalawan, atau Kampar, 5) Industri pengolahan bahan makanan, ikan, ayam dan lain-lain dijaga keberlangsungan produk sinya semasa PSBB. Jamin keamanan pekerjaannya dari penularan Covid-19. Mereka merupakan

pahlawan level kedua setelah petugas medis, dan dapat dilengkapi dengan APD khusus untuk dapat bekerja memproduksi terus menerus (Firmansyah, April 2020).

SIMPULAN

Tanpa harus berbasa-basi dan dibungkus dengan kata-kata lip-service kepada masyarakat, dalam kondisi wabah covid ini diperlukan aksi nyata bukan janji-janji politis atau hanya sebatas wacana program bantuan. Pemerintah kota Pekanbaru dan Provinsi Riau harus berpihak kepada masyarakat dengan memperhatikan masalah kesehatan (upaya maksimal menanggulangi wabah pandemi covid 19 dengan menghilangkan kasta kaya atau miskin), ketahanan pangan dan ketersediaan pangan harus menjadi prioritas oleh pemerintah kota Pekanbaru atau Provinsi Riau yang diharapkan dapat mengurangi gejolak-gejolak yang dapat terjadi dalam masyarakat. Untuk sementara dikesampingkan masalah pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru atau provinsi Riau, dengan tetap fokus bagaimana masyarakat dapat saling bahu membahu dengan pemerintah untuk menanggulangi wabah covid 19 ini dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam keadaan pendapatan yang serba kurang, bertahan untuk bankit dan maju.

Pemberlakuan social distancing dan PSBB dalam waktu (1 kali 15 hari) atau dilakukan perpanjangan di kota Pekanbaru telah memberikan dampak, yaitu; 1) sektor tenaga kerja, seperti; dirumahnya untuk sementara sejumlah tenaga kerja dari berbagai aktivitas ekonomi atau telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah tenaga kerja karena menurun drastisnya omzet dan pendapatan perusahaan, kondisi ini berkaitan langsung kepada pendapatan masyarakat yang semakin turun dan melakukan penghematan dalam konsumsinya, 2) berlakunya pembatasan jam operasional berbagai aktivitas usaha di kota Pekanbaru (Mall, Mini Market, UMKM, pasar tradisional, pasar kaget, pedagang kali lima), 3) berlakunya pembatasan pelayanan publik diberbagai instansi, 4) diliburkannya aktivitas pendidikan dari TK, SD, SMA

Eko dan Bisnis (*Riau Economics and Business Review*)
Volume 11, Nomor 2, 27 Juni 2020

sampai ke Perguruan Tinggi dan sudah terjadi selama 2,5 bulan (16 Maret 2020 sampai 31 Mei 2020), 5) ditutupnya tempat hiburan dan daerah kunjungan wisata di wilayah kota Pekanbaru dan Riau, 6) serta pembatasan-pembatasan yang terjadi pada sektor lainnya.

Implikasi dari Social distancing dan PSBB yang diberlakukan telah memberikan kontribusi kepada kelambanan (inersia) pergerakan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, kondisi ini tidak boleh berlangsung lama karena akan dapat memperburuk perekonomian, kultur dan sosial masyarakat, oleh karenanya diperlukan sikap peduli, disiplin, persatuan dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi segala aturan yang dikeluarkan pemerintah kota Pekanbaru berkaitan dengan recovery pandemic covid 19 agar cepat teratasi dan perekonomian pulih kembali.

Kepada pelaku usaha dan bisnis yang terkena dampak covid 19 yang telah merumahkan karyawannya diharapkan hanya bersifat sementara, setelah kondisi pulih dapat memperkerjakan kembali karya wan seperti biasanya. Kepada pemerintah yang mengurus masalah listrik berikan diskon dalam pembayaran beban listrik oleh masyarakat, kondisi yang terjadi pembayaran beban listrik justru naik dengan alasan masyarakat banyak work for home (WFH). Kepada lembaga keuangan; bank pemerintah atau bank swasta yang ada di kota Pekanbaru atau Riau dapat memberikan keringanan kepada sektor UMKM dalam pembayaran angsuran pinjaman untuk masa 3 bulan atau 6 bulan kedepan atau selama wabah pandemic covid 19 ini (misal; dengan metode putus sambung) setelah 3 bulan cuti bayar, setelah itu pembayaran normal kembali serta tidak meminta beban tambahan kepada UMKM dengan menggunakan alasan tertentu

DAFTAR RUJUKAN

Andries, Rinaldo. 2015. *Teori Konsumsi*, dalam <http://rinaldofili.co.id/2015/01/teori->

- [konsumsi-ekonomi.html](#), di download 31 Maret 2017.
- Firmansyah. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Universitas Diponegoro Semarang, halaman ; 1-51.
- Herispon, H. (2017). Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Al-Maqdis ; Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(Juli-Desember), 141–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v2i2.124>
- Miller, Roger LeRoy and Meiners, Roger. E. 1993. *Intermediate Microeconomics Theory, Issues*, Penerjemah ; Haris Munandar. Edisi 1. Cetakan 1. Raja Grafindo Persada 1993. Jakarta, halaman 745.
- Raharja, Pratama dan Manurung, M. 2005. *Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit Faklutas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman ; 43-44.
- URL:
Aida, Nur Rohmi, April 2020
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/080758265/menkes-setujui-psbb-dki-jakarta-berikut-pengertian-syarat-dan-hal-hal-yang>.
- Firmansyah, April 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro;
<https://www.goriau.com/berita/baca/mempersiapkan-ketahanan-ekonomi-masyarakat-dalam-masa-psbb-menghadapi-wabah-covid19.html>
- Firmansyah, April 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro;
<https://www.goriau.com/berita/baca/berhitung-kebutuhan-dana-dan-strategi-dalam-masa-pembatasan-sosial-covid19-untuk-penyelamatan-kebutuhan-pangan-pokok-masyarakat.html>
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20200413/534/1226191/bi-riau-hitung-dampak-covid-19-terhadap-pertumbuhan-ekonomi->
- <https://kepri.antarane.ws.com/berita/73986/dampak-covid-19-riau-alami-deflasi>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200405124116-92-490447/enam-hotel-di-riau-tutup-karena-corona-300-orang-dirumahkan>
- <https://www.goriau.com/berita/baca/ancaman-gelombang-phk-massal-akibat-pandemi-corona-apa-antisipasi-pemerintah.html>
- <https://www.halloriau.com/read-otonomi-128581-2020-04-16-covid19-antara-upaya-pemerintah-dan-daya-masyarakat.html>
- <https://www.halloriau.com/read-otonomi-128381-2020-04-11-3647-pekerja-dari-89-badan-usaha-di-riau-dirumahkan-akibat-corona.html>
- <https://www.riauin.com/read-6-13841-2020-04-28-kfc-tutup-97-gerai-sebagian-karyawan-dirumahkan-dan-thr-dipotong.html>
- <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMX>
- <https://www.gatra.com/detail/news/478162/ekonomi/dampak-covid-19-ratusan-perusahaan-rumahkan-karyawan-di-riau>